

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

5.1 Arahan RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, dan Arahan Gubernur Sumatera Selatan

5.1.1 Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 menyebutkan bahwa tahap ketiga pembangunan Sumatera Selatan (2013-2018) mengutamakan pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif dengan 4 (empat) strategi: (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, (2) menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, (3) mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan (4) mendorong pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

5.1.2 Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033

Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang produktif, efisien dan berkualitas menuju Provinsi unggul dan terdepan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga menyebutkan bahwa penataan ruang terdiri dari pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Pengembangan struktur ruang diarahkan untuk: (1) Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan, (2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, (3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah, (4) Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara, pengembangan pola ruang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk: (1) memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung dan (2) menjaga dan

meningkatkan kualitas kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk: (1) meningkatkan produktivitas lahan tidur (lahan non produktif) dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Sumatera Selatan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional; (2) mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan (3) meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

5.1.3 Arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2013-2018 menegaskan arah pembangunan untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan yang seimbang baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi dan pengendalian inflasi; (2) meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, dan stabilitas politik dengan memantapkan pertahanan dan keamanan dan memantapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada; (3) meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan; dan (4) meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel 5. 1

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025,
Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 dan
Arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi lebih dari 6,5 persen per tahun (2) penguatan struktur ekonomi yg didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa	1. Mengembangkan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (<i>multi-gate</i>) dalam menciptakan keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang baik dari sisi produksi maupun permintaan dan pengendalian inflasi melalui: (1) Peningkatan daya beli masyarakat (2) Peningkatan iklim investasi (3) Peningkatan penyerapan anggaran, perbaikan kualitas belanja

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
<p>(3) pengembangan sektor-sektor baru potensial</p> <p>(4) peningkatan surplus perdagangan dan investasi</p> <p>(5) penurunan pengangguran terbuka kurang dari 10 persen</p> <p>(6) penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan</p> <p>(7) penguatan kualitas SDM.</p> <p>2. Menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan:</p> <p>(1) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan</p> <p>(2) penguasaan iptek</p> <p>(3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>(4) perbaikan kualitas permukiman dan perumahan</p> <p>(5) pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marjinal lainnya, peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal.</p> <p>3. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan kebijakan:</p> <p>(1) pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan</p> <p>(2) penataan ruang yang adil dan seimbang</p> <p>(3) penguatan sistem transportasi wilayah revitalisasi pertanian dan agribisnis.</p> <p>4. Mendorong pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan kebijakan:</p> <p>(1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah</p>	<p>2. Mengembangkan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional</p> <p>3. Mengembangkan tata ruang yang akomodatif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin</p> <p>4. Mengoptimalkan kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai "salah satu titik sentuh" dan "pintu gerbang" Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang</p>	<p>(4) Peningkatan daya saing ekspor</p> <p>(5) Peningkatan nilai tambah industri</p> <p>(6) Peningkatan perdagangan antarwilayah</p> <p>(7) Peningkatan infrastruktur</p> <p>2. Meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan stabilitas politik, yaitu:</p> <p>(1) menjaga stabilitas harga dan nilai tukar</p> <p>(2) mencegah konflik sosial, melalui:</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan;</p> <p>b. Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.</p> <p>c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial;</p> <p>(3) Stabilitas politik :</p> <p>a. Memantapkan pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; • Meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
<p>(2) peningkatan kualitas pelayanan umum</p> <p>(3) penguatan kapasitas keuangan daerah</p> <p>(4) penguatan peran serta masyarakat</p> <p>(5) pengembangan keterbukaan informasi</p> <p>(6) pembangunan politik lokal</p> <p>(7) peningkatan penegakan hukum</p> <p>(8) peningkatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana peningkatan keamanan dan ketertiban</p>	<p>dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>5. Mendorong pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antarsub wilayah.</p>	<p>kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme.</p> <p>b. Memantapkan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan pemilukada. • Memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
		<p>3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, yaitu :</p> <p>(1) Pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaatan.</p> <p>(2) Peningkatan SDM yang</p>

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
		<p>berkualitas berbasis kompetensi.</p> <p>(3) Penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (<i>sustainable livelihood</i>) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (<i>public-people-private partnerships</i>).</p> <p>4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan:</p> <p>(1) Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) Mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran.</p> <p>(3) Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu.</p> <p>(4) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.</p>

5.2. Visi dan Misi

5.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

- (1) Kemakmuran Daerah
- (2) Kesejahteraan Rakyat
- (3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

5.2.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Memantapkan stabilitas daerah;
- (3) Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan;
- (4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif

masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB).

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaatan; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparat pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan, visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Milenium,

mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Sasaran					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan mutu sumber daya manusia	Nilai IPM		73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51
2	Mengurangi kesenjangan pendapatan	Indeks Gini	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
4	Mengendalikan harga	Angka Inflasi (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Mengurangi pengangguran	Angka pengangguran terbuka (%)	5,70	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06
6	Mengurangi kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	13,48	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78
7	Mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,59	61,41	58,86	56,55	53,77	51,23	48,90

Dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan mewujudkan misi Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Tujuan 1: Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya produksi pertanian antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi pertanian;
- (2) Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian antara lain ditandai dengan ragam teknologi terapan pertanian dan jumlah penyuluh pertanian;
- (3) Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKMK) di sektor pertanian antara lain ditandai dengan pertumbuhan usaha ekonomi rumah tangga berbasis produk pertanian;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian antara lain ditandai dengan harga jual produk pertanian di tingkat petani;

- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian antara lain ditandai dengan penerimaan retribusi usaha pertanian.

Tujuan 2: Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya IKM berbasis pertanian antara lain ditandai dengan jumlah IKM berbasis pertanian;
- (2) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan antara lain ditandai dengan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri pengolahan;
- (3) Meningkatnya produk IKM antara lain ditandai dengan pertumbuhan produk sektor industri pengolahan;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM antara lain ditandai dengan penerapan teknologi tepat guna;
- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan antara lain ditandai dengan pendapatan daerah Kabupaten/Kota dari usaha industri pengolahan.

Tujuan 3: Mengembangkan pariwisata, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya jasa pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah wisatawan;
- (2) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata per tahun;
- (3) Meningkatnya nilai tambah objek wisata antara lain ditandai dengan jumlah daya tarik objek wisata yang dikembangkan;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah sanggar seni yang berkembang dan jumlah IKM yang mendukung pariwisata;
- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah jasa transportasi dan pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pariwisata.

Tujuan 4: Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya produksi pertambangan antara lain ditandai dengan jumlah produksi hasil tambang per tahun;
- (2) Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan per tahun;
- (3) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan antara lain ditandai dengan besaran PNBPN, retribusi, land rent dan royalty.

Tujuan 5: Mengembangkan perusahaan daerah, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah antara lain ditandai angka bagi hasil dari perusahaan daerah dan angka penyertaan modal provinsi;
- (2) Meningkatnya pendapatan perusahaan daerah antara lain ditandai dengan nilai penjualan perusahaan daerah dan nilai keuntungan perusahaan daerah.

Tujuan 6: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api antara lain ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana penunjang KEK;
- (2) Meningkatnya investasi antara lain ditandai dengan nilai investasi swasta per tahun dan pertumbuhan nilai investasi per tahun;
- (3) Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD) antara lain ditandai dengan berkembangnya jumlah KIUD, dan jumlah prasarana pendukung KIUD;
- (4) Meningkatnya perdagangan internasional antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor.

Tujuan 7: Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya mobilitas barang antarwilayah antara lain ditandai dengan jumlah barang yang terangkut dengan transportasi darat, jumlah barang yang terangkut dengan transportasi udara, jumlah barang yang terangkut dengan transportasi sungai, danau dan laut;

- (2) Meningkatnya perdagangan antarwilayah antara lain ditandai dengan nilai perdagangan antarwilayah.

Tujuan 8: Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah, dengan sasaran:

- (1) Terbangunnya jalan dan jembatan antara lain ditandai dengan panjang jalan dengan kondisi baik dan mantap;
- (2) Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi daerah yang terpadu dan merata antara lain ditandai dengan jumlah penumpang pengguna transportasi darat, jumlah penumpang pengguna transportasi sungai, danau dan laut, persentase penduduk pengguna transportasi udara;
- (3) Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas antara lain ditandai dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (*over loading*) dan kendaraan laik jalan;
- (4) Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni antara lain ditandai dengan jumlah kawasan permukiman sehat dan layak huni;
- (5) Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi antara lain ditandai dengan cakupan pelayanan drainase permukiman dan cakupan penanganan TPA sampah.

Tujuan 9: Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) secara sistematis, dengan sasaran:

- (1) Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa) antara lain ditandai dengan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdaftar dan jumlah ruang kreatif publik;
- (2) Berkembangnya jaringan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) antara lain ditandai dengan jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN, jumlah kemitraan strategis IPTEKIN, jumlah *technopark* yang mengacu pada standar WTA (*World Trade Asean*);
- (3) Berkembangnya bisnis inovatif antara lain ditandai dengan jumlah Pusat Inovasi (PI), dan persentase produk bisnis inovatif yang memenuhi standar internasional;
- (4) Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah dan tingkat pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategis daerah.

Tabel 5. 2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya produksi pertanian	1.1.1 Jumlah produksi bidang pertanian per tahun
	1.2 Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian	1.2.1 Ragam teknologi terapan pertanian
		1.2.2 Jumlah penyuluh pertanian
	1.3 Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian	1.3.1 Pertumbuhan usaha ekonomi rumah tangga berbasis produk pertanian
	1.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian	1.4.1 Harga jual produk pertanian di tingkat petani
1.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari ush pertanian	1.5.1 Penerimaan retribusi usaha pertanian	
2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian	2.1 Meningkatnya IKM berbasis pertanian	2.1.1 Jumlah IKM berbasis pertanian
	2.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan	2.2.1 Pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri pengolahan
	2.3 Meningkatnya produk IKM	2.3.1 jumlah produksi sektor industri pengolahan
	2.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM	2.4.1 Penerapan teknologi tepat guna
	2.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan	2.5.1 Pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pengolahan
3. Mengembangkan pariwisata	3.1 Berkembangnya jasa pariwisata	3.1.1 Jumlah wisatawan
	3.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata	3.2.1 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata per tahun
	3.3 Meningkatnya nilai tambah objekwisata	3.3.1 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan
	3.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata	3.4.1 Jumlah sanggar seni yang berkembang
		3.4.2 Jumlah IKM yang mendukung pariwisata
3.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata	3.5.1 Jumlah Jasa Transportasi	
	3.5.2 Pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4. Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya produksi pertambangan	4.1.1 Jumlah produksi hasil tambang per tahun
	4.2 Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan	4.2.1 Angka pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan per tahun
	4.3 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan	4.3.1 Besaran PNPB, retribusi, land rent dan royalty
5. Mengembangkan perusahaan daerah	5.1 Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah	5.1.1 Angka Bagi Hasil dari Perusahaan Daerah 5.1.2 Angka Penyertaan Modal Provinsi
	5.2 Meningkatnya pendapatan perusahaan daerah	5.2.1 Nilai penjualan perusahaan daerah 5.2.2 Nilai keuntungan perusahaan daerah
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	6.1 Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA	6.1.1 Jumlah sarana dan prasarana penunjang KEK
	6.2 Meningkatnya investasi	6.2.1 Nilai investasi swasta/thn 6.2.2 Pertumbuhan nilai investasi per tahun
		6.3 Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)
6.4 Meningkatkan perdagangan internasional	6.4.1 Nilai ekspor 6.4.2 Pertumbuhan nilai ekspor	
	7. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah	
7.2 Meningkatnya perdagangan antarwilayah		7.2.1 Nilai perdagangan antarwilayah
8. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah	8.1 Terbangunnya jalan dan jembatan	8.1.1 Panjang jalan dengan kondisi baik dan mantap
	8.2 Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transp. yang terpadu dan merata	8.2.1 Jumlah penumpang pengguna transport. darat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		8.2.2 Jumlah penumpang pengguna transportasi sungai, danau dan laut 8.2.3 Persentase penduduk pengguna transportasi udara
	8.3. Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas	8.3.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 8.3.2 Menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading) 8.3.3 Kendaraan laik jalan
	8.4. Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni	8.4.1 Jumlah kawasan permukiman sehat dan layak huni
	8.5. Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi	8.5.1 Cakupan pelayanan drainase permukiman 8.5.2 Cakupan penanganan TPA sampah
9. Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem	9.1. Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)	9.1.1 Jumlah HKI yang terdaftar 9.1.2 Jumlah ruang kreatif publik
	9.2. Berkembangnya jaringan IPTEKIN	9.2.1 Jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN 9.2.2 Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN 9.2.3 Jumlah technopark yang mengacu pada standar WTA (<i>World Trade Asean</i>)
	9.3. Berkembangnya bisnis inovatif	9.3.1 Jumlah Pusat Inovasi (PI) 9.3.2 Jumlah produk bisnis inovatif baru
	9.4. Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah	9.4.1 Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah 9.4.2 Tingkat pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategis daerah

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: **Meningkatkan Stabilitas Daerah**; tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 10: Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya ketahanan pangan daerah antara lain ditandai dengan jumlah pasokan pangan dan distribusi pangan;
- (2) Terwujudnya ketahanan energi daerah antara lain ditandai dengan jumlah pasokan listrik.

Tujuan 11: Meningkatkan stabilitas sosial daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan adil antara lain ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat, tingkat kecepatan pemberian ijin usaha dan kualitas pelayanan aparatur, persentase desa terlayani fasilitas teknologi, komunikasi dan informatika di wilayah Sumsel, persentase pelayanan informasi online berbasis ICT yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel;
- (2) Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik antara lain ditandai dengan status laporan keuangan daerah, jumlah SKPD dengan laporan keuangan dan kinerja baik, jumlah ringkasan dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik, dan persentase peningkatan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) Berkembangnya perencanaan yang partisipatif dan berbasis kinerja antara lain ditandai dengan persentase penerapan sistem perencanaan berbasis informasi (*e-planning*);
- (4) Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antara lain ditandai dengan jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik, jumlah konflik pendirian rumah ibadah yang ditangani, jumlah forum pemuda antar umat beragama yang aktif; jumlah anggota FKUB yang aktif, dan jumlah kasus konflik antar umat beragama;
- (5) Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif, persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang aktif, jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat, jumlah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif; jumlah organisasi masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah;
- (6) Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah antara lain ditandai dengan jumlah arsip yang tertata dan terdata dengan baik dan jumlah perangkat sarana layanan informasi arsip.

Tujuan 12: Meningkatkan stabilitas politik dan ketertiban daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal antara lain ditandai dengan persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik, jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik, jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik;
- (2) Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil antara lain ditandai dengan persentase penduduk yang ikut dalam pemilu dan pemilukada, jumlah kasus sengketa pemilu dan pemilukada, dan persentase penyelesaian kasus sengketa pemilu dan pemilukada;
- (3) Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan jumlah kasus pelanggaran perda.

Tabel 5. 3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kedua
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
10. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah	10.1 Terwujudnya ketahanan pangan daerah	10.1.1 Jumlah pasokan pangan 10.1.2 Distribusi pangan
	10.2 Terwujudnya ketahanan energi daerah	10.2.2 Jumlah pasokan listrik
11. Meningkatkan stabilitas sosial daerah	11.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil	11.1.1 Tingkat kepuasan masyarakat
		11.1.2 Tingkat kecepatan pemberian ijin usaha 11.1.3 Kualitas pelayanan aparatur
	11.2 Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik	11.2.1 Status laporan keuangan daerah
		11.2.2 Jumlah SKPD dengan laporan keuangan dan kinerja dengan status baik
		11.2.3 Jumlah ringkasan laporan keuangan dan perencanaan yang dapat diakses publik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		11.2.4 Persentase peningkatan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	11.3 Berkembangnya perencanaan yang partisipatif dan berbasis kinerja	11.3.1 Persentase penerapan sistem perencanaan berbasis informasi (<i>e-planning</i>)
	11.4 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	11.4.1 Jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik 11.4.2 Jumlah konflik pendirian rumah ibadah yang ditangani 11.4.3 Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif 11.4.4 Jumlah Anggota FKUB yang aktif 11.4.5 Jumlah kasus konflik antar umat beragama
	11.5 Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat	11.5.1 Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif 11.5.2 Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 11.5.3 Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif 11.5.4 Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat 11.5.5 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif 11.5.6 Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah
	11.6 Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	11.6.1 Jumlah arsip yang tertata dan terdata dengan baik 11.6.2 Jumlah perangkat sarana layanan informasi arsip

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
12. Meningkatkan stabilitas politik dan ketertiban daerah	12.1 Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal	12.1.1 Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik 12.1.2 Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik 12.1.3 Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
	12.2 Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	12.2.1 Persentase penduduk yang ikut dalam pemilu dan pilukada 12.2.2 Jumlah kasus sengketa pemilu dan pemilukada 12.2.3 Persentase penyelesaian kasus sengketa pemilu dan pemilukada
	12.3 Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab	12.3.2 Frekuensi pertemuan Forkompimda
	12.4 Terwujudnya aparat yang andal dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	12.4.1 Jumlah kasus pelanggaran Perda

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: **Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan**; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 13: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan angka harapan hidup;
- (2) Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah kasus gangguan jiwa, jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa, dan jumlah kasus pasung;
- (3) Meningkatnya status gizi masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya prevalensi balita dengan berat badan rendah atau angka gizi buruk;

- (4) Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
- (5) Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik antara lain ditandai dengan jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela), angka kesembuhan penderita TB Paru (BTA+), angka kesakitan penyakit DBD per 100.000 penduduk, *Annual Parasit Incidence* (API), jumlah kasus narkoba yang direhabilitasi, jumlah kunjungan penderita narkoba meningkat;
- (6) Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan antara lain ditandai dengan persentase rumah sehat dan persentase keluarga yang memiliki akses air bersih.

Tujuan 14: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murid (APM) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, APM SMP, APK SMP, APM SMA/K, APK SMA/K, Angka Putus Sekolah (APtS) SD, SMP, SMA/K, Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan Inklusif; serta jumlah SMP, SMA satu atap;
- (2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan SD, angka kelulusan SMP, dan angka kelulusan SMA/K serta Angka melek huruf;
- (3) Meningkatnya keterampilan siswa SMA antara lain ditandai dengan jumlah SMA yang memiliki LAB bengkel dan keterampilan;
- (4) Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi antara lain ditandai dengan APK perguruan tinggi;
- (5) Meningkatnya minat baca masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan, jumlah diversifikasi layanan perpustakaan, jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka, dan jumlah perpustakaan yang dibina.

Tujuan 15: Mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera, dengan sasaran:

- (1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk antara lain ditandai dengan meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur, rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi, *Total Fertility Rate* (TFR);
- (2) Terwujudnya keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan berkembangnya persentase kelompok usaha perempuan.

Tujuan 16: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pemuda yang difasilitasi, jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi, jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, jumlah anggota pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan;
- (2) Berkembangnya kewirausahaan para pemuda antara lain ditandai dengan jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda;
- (3) Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain ditandai dengan jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi peningkatan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS.

Tujuan 17: Mengembangkan industri jasa olahraga, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat antara lain ditandai dengan berkembangnya jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat, jumlah sarana dan prasarana olahraga, jumlah produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi, jumlah masyarakat yang ikut permasalahan olahraga, jumlah medali emas atlet PPLP, jumlah prestasi atlet dalam PON;

Tujuan 18: Meningkatkan perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak antara lain ditandai dengan jumlah SKPD yang mengimplementasikan PPRG;
- (2) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan antara lain ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), jumlah SKPD provinsi yang memiliki dan memanfaatkan data terpilah;

- (3) Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak antara lain ditandai dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani, jumlah pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan dan ditangani.

Tujuan 19: Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja antara lain ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal, angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK dan telah ditempatkan, dan jumlah sarana dan prasarana BLKI;
- (2) Berkurangnya pengangguran antara lain ditandai dengan jumlah penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka;
- (3) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat antara lain ditandai dengan meningkatnya rasio upah/gaji pekerja lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja.

Tujuan 20: Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya wilayah perdesaan di kawasan transmigrasi antara lain ditandai dengan jumlah KK Transmigrasi yang memperoleh bantuan untuk usaha produktif, jumlah sarana dan prasarana di lokasi KTM, serta jumlah transmigrasi lokal yang ditempatkan (KK);
- (2) Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal antara lain ditandai dengan persentase desa dengan akses air bersih, persentase desa dengan akses listrik, persentase desa yang terlayani transportasi, dan persentase desa yang terlayani jaringan komunikasi.

Tujuan 21: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Menurunnya angka kemiskinan antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosial, jumlah waduk dan embung dengan kondisi baik, panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik, persentase akses pelayanan air bersih, tingkat kapasitas pengolahan sampah, tingkat kapasitas pengolahan limbah, persentase jaringan sanitasi yang aman dan sehat.

Tujuan 22: Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa antara lain ditandai dengan jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif, dan persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa;
- (2) Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa antara lain ditandai dengan persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan persentase desa yang melaksanakan Musrenbangdes;
- (3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa antara lain ditandai dengan persentase aparatur pemerintah desa yang tertib administrasi, dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (akte, KTP, Jamkesmas), serta persentase aparatur desa yang profesional.

Tujuan 23: Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya surplus usaha koperasi antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai modal koperasi dan nilai usaha koperasi;
- (2) Meningkatnya pendapatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKMK) antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai modal UMKMK, omzet UMKMK, penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK.

Tabel 5. 4

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
13. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13.1 Meningkatkan status kesehatan masyarakat	13.1.1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
		13.1.2 Angka harapan hidup
	13.2 Meningkatkan status kesehatan jiwa masyarakat	13.2.1 Jumlah kasus gangguan jiwa
		13.2.2 Jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa
		13.2.3 Jumlah kasus pasung
	13.3 Meningkatkan status gizi masyarakat	13.3.1 Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)
	13.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi	13.4.1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
13.4.2 Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih		
13.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	13.5.1 Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	13.5.2 Angka kesembuhan Penderita TB Paru (BTA+)
		13.5.3 Angka kesakitan Penyakit DBD per 100.000 Penduduk
		13.5.4 <i>Annual Parasit Incidence</i> (API)
		13.5.5 Jumlah kasus narkoba yang direhabilitasi
		13.5.6 Jumlah kunjungan penderita narkoba
		13.6 Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
	13.6.2 Persentase Keluarga yang memiliki akses air bersih	
14. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	14.1 Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	14.1.1 APM SD
		14.1.2 APK SD
		14.1.3 APM SMP
		14.1.4 APK SMP
		14.1.5 APM SMA/K

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		14.1.6 APK SMA/K 14.1.7 APtS SD 14.1.8 APtS SMP 14.1.9 APtS SMA/K 14.1.10 Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif 14.1.11 Jumlah SMP/SMA satu atap
	14.2 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	14.2.1 Angka kelulusan SD 14.2.2 Angka kelulusan SMP 14.2.3 Angka kelulusan SMA/K 14.2.4 Angka Melek Huruf
	14.3 Meningkatnya keterampilan siswa SMA	14.3.1 SMA yang memiliki LAB bengkel dan keterampilan
	14.4 Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan PT	14.4.1 APK Perguruan Tinggi
	14.5 Meningkatnya minat baca masyarakat	14.5.1 Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan 14.5.2 Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan 14.5.3 Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka 14.5.4 Jumlah perpustakaan yang dibina
15. Mengembangkan keluarga berencana dan sejahtera	15.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	15.1.1 Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur 15.1.2 Rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi 15.1.3 <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
		15.2 Terwujudnya keluarga sejahtera
16. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	16.1 Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan	16.1.1 Jumlah pemuda yang difasilitasi
		16.1.2 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi
		16.1.2 Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan
		16.1.3 Jumlah Anggota pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	16.2. Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	16.2.1. Jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda
	16.3 Meningkatkan prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi	16.3.1 Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitas peningkatan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS
17. Mengembangkan industri jasa olahraga	17.1 Berkembangnya industri olahraga, jasa services, peralatan (goods) dan partisipasi masyarakat	17.1.1 Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat 17.1.2 Jumlah sarana dan prasarana olahraga 17.1.3 Jumlah produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi 17.1.4 Jumlah masyarakat yang ikut permasalahan olahraga 17.1.5 Jumlah medali emas atlet PPLP 17.1.6 Jumlah prestasi atlet dalam PON
18. Meningkatkan perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan	18.1 Meningkatkan peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	18.1.1 Jumlah SKPD provinsi yang mengimplementasikan PPRG
	18.2 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	18.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 18.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 18.2.2 Jumlah SKPD provinsi yang memiliki dan memanfaatkan data terpilah
	18.3 Meningkatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	18.3.1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani 18.3.2 Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani 18.3.3 Jumlah pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan dan ditangani

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	
19. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja	19.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja	19.1.1 Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 19.1.2 Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal 19.1.3 Angka pencari kerja yang dilatihdi BLK/LLK dan telah ditempatkan 19.1.4 Jumlah sarana dan prasarana BLKI	
	19.2 Berkurangnya pengangguran	19.2.1 Jumlah penduduk yang bekerja 19.2.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 19.2.3 Tingkat pengangguran terbuka	
	19.3 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat	19.3.1 Upah/Gaji pekerja lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja 19.3.2 Jumlah penyelesaian	
	20. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota	20.1 Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi	20.1.1 Jumlah KK Transmigrasi yang memperoleh bantuan untuk usaha produktif
			20.1.2 Jumlah sarana dan prasarana di lokasi KTM
			20.1.3 Jumlah transmigrasi lokal yang ditempatkan (KK)
20.2 Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal		20.2.1 Persentase desa dengan akses air bersih	
		20.2.2 Persentase desa dengan akses listrik	
	20.2.3 Persentase desa yang terlayani transportasi		
	20.2.4 Persentase desa yang terlayani jaringan komunikasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
21. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	21.1 Menurunnya angka kemiskinan	21.1.1 Jumlah penduduk miskin 21.1.2 Persentase penduduk miskin 21.1.3 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosial 21.1.4 Jumlah waduk dan embung dengan kondisi baik 21.1.5 Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik 21.1.6 Persentase akses pelayanan air bersih 21.1.7 Tingkat kapasitas pengolahan sampah 21.1.8 Tingkat kapasitas pengolahan limbah 21.1.9 Persentase jaringan sanitasi yang aman dan sehat
22. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa	22.1 Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa	22.1.1 Jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif 22.1.2 Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa
	22.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa	22.2.1 Persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan 22.2.2 Persentase desa yang melaksanakan Musrenbangdes
	22.3 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	22.3.1 Persentase aparatur pemerintah desa yang tertib administrasi dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (akte, KTP, Jamkesmas) 22.3.2 Persentase aparatur desa yang profesional
23. Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan	23.1 Meningkatnya surplus usaha koperasi	23.1.1 Nilai Modal koperasi 23.1.3 Nilai volume usaha koperas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	23.2 Meningkatnya pendapatan pelaku UMKMK	23.2.1 Nilai modal UMKMK 23.2.2 Omzet UMKMK 23.2.3 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: **Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana;** maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 24: Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dengan sasaran:

- (1) Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah antara lain ditandai dengan jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang;
- (2) Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang antara lain ditandai dengan menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang;
- (3) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang antara lain ditandai dengan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang;
- (4) Penyelesaian batas wilayah antara lain ditandai dengan panjang garis batas daerah yang disahkan dan persentase penyelesaian sengketa batas wilayah.

Tujuan 25: Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, dengan sasaran:

- (1) Terkelolanya kawasan hutan antara lain ditandai dengan jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas, jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan/KPH yang beroperasi dan luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi.

Tujuan 26: Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan pengelolaan DAS terpadu antara lain ditandai dengan jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehabilitasi HL/KSA/KPA dan HKm/HD);

- (2) Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan antara lain ditandai dengan jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Tujuan 27: Mengembangkan laju penurunan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran:

- (1) Berkurangnya laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan antara lain ditandai dengan laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tujuan 28: Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK, dengan sasaran:

- (1) Terkendalinya laju peningkatan emisi GRK di Provinsi Sumsel antara lain ditandai dengan jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (ton CO₂eq)

Tujuan 29: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran:

- (1) Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH antara lain ditandai dengan jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Terwujudnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH antara lain ditandai dengan persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan Peraturan Daerah bidang LH yang diterbitkan;
- (3) Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan ditandai dengan Laboratorium LH yang terakreditasi.

Tujuan 30: Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan persentase sistem peringatan dini (*early warning system*);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat bencana antara lain ditandai dengan persentase kerugian akibat bencana;

- (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan jumlah masyarakat siaga bencana dan jumlah desa tangguh;
- (4) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana serta persentase penurunan titik kebakaran (*hotspot*).

Tabel 5.5

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Keempat
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
24. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	24.1 Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah	27.1.1 Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang
	24.2 Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	27.2.1 Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang
	24.3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang	24.3.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	24.4 Penyelesaian Batas Wilayah	24.4.1 Panjang garis batas daerah yang disahkan 24.4.2 Persentase penyelesaian sengketa batas wilayah
25. Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan	25.1 Terkelolanya kawasan hutan	25.1.1 Jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat diindaklanjuti dengan tata batas
		25.1.2 Jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi
		25.1.3 Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi
26. Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan	26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu	26.1.1 Jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehabilitasi HL/KSA/KPA & HKm/HD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan	26.2.1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan
27. Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup	27.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan	27.1.1 Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
28. Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK	28.1 Terkendalinya laju peningkatan emisi GRK di Prov. Sumsel	28.1.1 Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (ton CO ₂ eq)
29. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	29.1 Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH 29.2 Terwujudnya ketaatan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH 29.3 Meningkatkan kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan	29.1.1 Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 29.2.1 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 29.2.2 Peraturan Daerah bidang LH yang diterbitkan 29.3.1 Laboratorium LH yang terakreditasi
30. Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana	30.1 Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana 30.2 Berkurangnya kerugian akibat bencana 30.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 30.4 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	30.1.1 Persentase Sistem Peringatan Dini (<i>early warning system</i>) 30.2.1 Persentase kerugian akibat bencana 30.3.1 Jumlah masyarakat siaga bencana 30.3.2 Jumlah desa tangguh 30.4.1 Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana 30.4.2 Persentase penurunan titik kebakaran (<i>hotspot</i>)